



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- b. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap Perangkat Daerah dinyatakan dengan indikator kinerja.

- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU dan melaporkannya kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi.

### BAB III

#### PRINSIP PENETAPAN IKU

##### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Provinsi harus selaras antar tingkatan unit kerja.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :
  - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum, dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - d. kebutuhan data statistik; dan
  - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

##### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

##### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;

- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN IKU

##### Pasal 7

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU diberikan kewenangan kepada Biro Organisasi untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 60 TAHUN  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

Visi : Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional

- Misi :
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
  2. Memantapkan Stabilitas Daerah
  3. Meningkatkan Pemerintahan Yang Berkeadilan
  4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari & Penanggulangan Bencana

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1.	Pemanfaatan Fasilitas Pendukung Asian Games yang berkelanjutan	Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas Pendukung Asian Games yang berkelanjutan	1.1	Sukses Penyelenggaraan Asian Games	1.1.1	Persentase Kesuksesan Asian Games	Total Persentase Capaian Keberhasilan (Sukses Prestasi yaitu jumlah perolehan medali dibandingkan dengan target, Sukses Penyelenggaraan yaitu ketepatan jadwal pertandingan, jumlah cabor yang ditandingkan dibandingkan dengan target, Sukses Ekonomi Kerakyatan yaitu dampak peningkatan perekonomian di Sumsej) : 3 Sukses X 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1.2	Peningkatan Jumlah Industri Olahraga	1.2.1	Jumlah Event Olahraga yang Bertaraf Internasional	Jumlah Event Olahraga bertaraf Internasional pada tahun yang bersangkutan.	JSC, KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1.3	Peningkatan Wisatawan Berbasis Sport	1.3.1	Persentase Kunjungan Wisatawan Olahraga	Jumlah Kunjungan Wisatawan Olahraga : Jumlah Kunjungan Wisatawan X 100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pembangunan Lingkungan Berbasis Landscape	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (59,23)	2.1	Penurunan Emisi dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	2.1.1	Nilai Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air yang dicetak pada tahun yang bersangkutan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.	Peningkatan Investasi, Daya Saing, Pengembangan Usaha dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8-6,2%	3.1 Percepatan KEK TAA	2.1.2	Nilai Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				2.1.3	Nilai Indeks Tutupan Hutan dan Laban	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Hutan dan Laban yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				2.2.1	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Bencana yang ditanggulangi : Jumlah Kejadian Bencana X 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2.2.2	Persentase tertanganinya dan Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana : Jumlah Kebutuhan Korban Bencana X 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			3.2 Peningkatan Daya Saing Industri UKM dan IKM	3.1.1	Operasional KEK TAA	Waktu Peremian Operasional KEK TAA	Dinas Perdagangan
				3.2.1	% Pertumbuhan unit usaha IKM	Jumlah Unit Usaha IKM tahun sebelumnya - Jumlah unit usaha IKM tahun yang bersangkutan : Jumlah Unit Usaha IKM tahun yang lalu X 100%	Dinas Perindustrian
				3.2.2	% Pertumbuhan unit usaha Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi tahun sebelumnya - Jumlah unit usaha Koperasi tahun yang bersangkutan : Jumlah Unit Usaha Koperasi tahun yang lalu X 100%	Dinas Koperasi dan UKM
				3.2.3	% Pertumbuhan unit usaha UKM	Jumlah Unit Usaha UKM tahun sebelumnya - Jumlah unit usaha UKM tahun yang bersangkutan : Jumlah Unit Usaha UKM tahun yang lalu X 100%	Dinas Koperasi dan UKM



NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin sebesar 41.000 jiwa (0,5%)	3.3 Pengembangan Industri Hilir	3.3.1 Peningkatan Nilai Investasi	Selisih Realisasi Investasi Tahun yang bersangkutan dengan Realisasi Investasi tahun yang lalu	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
				3.4 Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata	3.3.2 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Selisih Realisasi Ekspor Tahun yang bersangkutan dengan Realisasi ekspor tahun yang lalu X100%	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	
				4.1 Meningkatkan Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran	4.1.1 Jumlah masyarakat miskin penerima jaminan dan bantuan sosial	Jumlah masyarakat miskin penerima jaminan dan bantuan sosial yang bersangkutan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
				4.2 Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas	4.2.1 Jumlah masyarakat miskin yang sebelumnya menganggur menjadi bekerja	Jumlah masyarakat miskin yang sebelumnya menganggur menjadi bekerja pada tahun yang bersangkutan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				4.3 Meningkatkan jumlah infrastruktur dasar yang dibangun	4.3.1 Jumlah masyarakat miskin yang menikmati peningkatan cakupan infrastruktur dasar	Jumlah masyarakat miskin yang menikmati peningkatan cakupan infrastruktur dasar pada tahun yang bersangkutan	Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				4.4 Meningkatkan jumlah asset masyarakat miskin	4.4.1 Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan penambahan aset	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan penambahan aset pada tahun yang bersangkutan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Rangkings e-Government Sumsel	9.1	Stabilitas Politik dan Keterlibatan Daerah	9.1	Persentase Konflik Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Kasus konflik yang terjadi pada tahun yang bersangkutan : Target Konflik yang ditetapkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			9.2	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Baik	9.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			8.2	Penurunan Kawasan Kumuh	8.2.1	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani pada tahun yang bersangkutan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			8.1.5	Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan	8.1.4	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan	Jumlah Puskesmas yang ada X 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			8.1.3	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan hidup	8.1.2	Jumlah desa/keurahan yang mendapat pembinaan dan pendampingan STBM	Jumlah desa/keurahan yang mendapat pembinaan dan pendampingan STBM pada tahun yang bersangkutan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			8.1.3	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan udara ambien dan tutupan hutan	8.1.3	Perhitungan persentase rata-rata kualitas air, kualitas udara ambien dan tutupan hutan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sistem air limbah layak / Jumlah Total Rumah Tangga di Sumatera Selatan X 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			8.1.3	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan udara ambien dan tutupan hutan	8.1.3	Perhitungan persentase rata-rata kualitas air, kualitas udara ambien dan tutupan hutan	Jumlah desa/keurahan yang mendapat pembinaan dan pendampingan STBM pada tahun yang bersangkutan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penguanggung Jawab
10.	Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produksi Pangan (Padi, Jagung, Kedele, Daging, Ikan)	9.3 Meningkatnya Kualitas Sistem dan Layanan Komunikasi dan Informatika	9.3.1 Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai hasil SKM seluruh Perangkat Daerah/Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan SKM	Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Organisasi
			10.2 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	10.2.1 Produksi Padi	luas panen padi x produktivitas padi	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.2 Produksi Jagung	luas panen jagung x produktivitas jagung	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.3 Produksi Kedelai	luas panen Kedelai x produktivitas Kedelai	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.4 Produksi Cabai	luas panen Cabai x produktivitas Cabai	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.5 Produksi Bawang Merah	luas panen Bawang Merah x produktivitas Bawang Merah	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.6 Produksi Jeruk	luas panen Jeruk x produktivitas Jeruk	BPS, Dinas Pertanian dan TPH	Dinas Pertanian dan TPH
				10.2.7 Produksi Daging Sapi	Jumlah pemotongan ternak di kali berat karkas	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				10.2.8 Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya dari seluruh jenis usaha budidaya di 17 kabupaten/kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
10.2.9 Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum dari 17 kabupaten/kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan				
10.2.10 Produksi Karet	Produktivitas x luas areal	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan				

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Rumus Penghitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			10.3	Peningkatan Ketersediaan Pangan	10.3.1	Jumlah Surplus Komoditi Pangan	Jumlah Kelompok jenis Komoditi Pangan yang mengalami Surplus	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			10.3.2	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	10.4.1	Jumlah Gabah yang disimpan dari total produksi ditingkat petani	1 % x jumlah desa yang mengalami rawan pangan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan (Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		10.4	Stabilisasi Harga Pangan dan Hasil Perkebunan	10.4.1	10.4.2	Koeffisien Varian Harga Pangan Pokok dari Harga Acuan	8% dari total produksi petani kv 15% dari harga acuan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan